

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi V*. (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2016).

Handoko. *Manajemen Edisi 2*. (Yogyakarta: BPFE, 2003).

Hasibuan, Malayu. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011).

Lukmanul, Hakim. *Kedudukan Hukum Komisi Negara di Indonesia; Eksistensi Komisi-komisi Negara (State Auxiliary Agency) Sebagai Organ Negara yang Mandiri Dalam Sistem Ketatanegaraan*. (Malang: Puskasi Universitas Widyagama Malang dan Setara Press (Kelompok Penerbit Intrans), 2010).

M. Hadjon, Philipus. *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*. (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987).

_____. *Pengantar Hukum Perizinan*. (Yuridika, Surabaya: 1993).

Mahmud, Peter, et al. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Prenada Media, 2021).

Maroni. *Pengantar Hukum Pidana Administrasi*. (Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja (AURA), 2015).

Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum*. (Yogyakarta, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010).

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Pengangkutan Darat, Laut, dan Udara*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991).

Njatrijani, Rinitami. *Hukum Transportasi*. (Semarang: Undip Law Press, 2022).

Panjaitan, Hulmah. *Hukum Penanaman Modal Asing*. (Jakarta: Ind-Hill Co, 2003).

Purwosutjipto, H.M.N. *Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia 3:*

Hukum Pengangkutan. (Jakarta: Penerbit Djambatan, 2003).

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum.* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014).

_____. *Hukum Tata Usaha Negara.* (Rajawali Pers, 2010).

Ridwan, HR. *Hukum Administrasi Negara.* (Jakarta: Rajawali Pers, 2006).

Sokenato, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2021).

Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum.* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003).

Sutedi, Adrian. *Good Corporate Governance.* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

Victorianus. *Hukum Pendirian Usaha dan Perizinan.* (Jakarta: Deepublish, 2015).

Yudha, Agus. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial.* (Jakarta: Kencana, 2010).

B. Jurnal

Biomantara. (2019). Peran Kereta Api Indonesia sebagai Infrastruktur Transportasi Wilayah Perkotaan. *Cakrawala-Jurnal Humaniora*, 19(1).

Dwiatmoko, Hermanto. (2018). Peran Perkeretaapian dalam Menunjang Sistem Logistik Nasional. *Jurnal Transportasi*. 18(2).

Maulana. (2019). Konsep Hukum Perizinan dan Pembangunan. *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan dan Pranata Sosial*. 3(1).

Raffles. (2020), Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Direksi dalam Pengurusan Perseroan Terbatas, *Jurnal Hukum*, (Jambi: Universitas Jambi).

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian. Peraturan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perkeretaapian.

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-01/MBU/2011 tentang
Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*)
Pada Badan Usaha Milik Negara

Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 20 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 31 Tahun 2012 tentang
Perizinan Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian Umum.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 21 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perkeretaapian Khusus.

Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 22 Tahun 2021 tentang Perizinan
Penyelenggaraan Perkeretaapian Umum.

Peraturan Menteri Perhubungan No. PM. 54 Tahun 2016 tentang Standar
Spesifikasi Teknis Identitas Sarana Perkeretaapian